

PAPUA BARAT

Tangkal Radikalisme, Gabungan LSM dan Ormas Masyarakat Se-Kota Cirebon Deklarasi Damai

Agung widodo - PUBLIKPAPUABARAT.COM

Jul 26, 2022 - 18:06



Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Menggelar Acara Silaturahmi Serta Deklarasi Damai Mendukung Pemerintah Tolak Radikalisme di Wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Selasa, (26/07/2022).

CEREBON- Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi

Masyarakat (Ormas) menggelar acara silaturahmi serta deklarasi damai mendukung Pemerintah Tolak Radikalisme di Wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Selasa, (26/07/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Cirebon Drs. H, Nasrudin Azis, S.H., Kadisbangpol Drs. Buntoro Tirto., Perwakilan Ormas (LSM BAR, PBB, LMP, LPKSM, LSM GAPURA Kota Cirebon, Perwakilan Tokoh Keagamaan Kota Cirebon, Perwakilan Tokoh Kasepuhan di Kota Cirebon (Prabu Diaz / Macan Ali), Perwakilan Kesultanan (Bpk. Raden Aryo), Perwakilan Tokoh Masyarakat Kota Cirebon, serta segenap tamu undangan.

Pada kesempatannya, Walikota Cirebon Drs. H, Nasrudin Azis, S.H., menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dari saudara-saudara semua untuk menjaga Kota Cirebon agar tetap kondusif.



"Lewat deklarasi ini, pernyataan sikap penolakan radikalisme. Ia menegaskan, bahwa tidak ada ruang bagi berbagai ide yang mengancam disintegrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", ujarnya Walikota Cirebon.

Nasrudin menambahkan, bahwa radikalisme dan terorisme saling berkaitan. Namun, hubungan keduanya ada yang langsung, ada pula yang tidak langsung.

"Tidak langsung dalam artian ada pemahaman yang sama bahwa suatu konsepsi yang berbasis fanatisme agama atau politik harus menjadi pilihan satu-satunya untuk ditegakkan dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam peta terorisme dan radikalisme, fenomena tersebut berkaitan dengan menguatnya puritanisme keagamaan. Ada juga kelompok yang mencita-citakan terbentuknya Khilafah Islamiah, yakni kekuasaan tingkat global di bawah bendera Islam".

Fakta-fakta yang ada juga menunjukkan adanya kelompok yang disebut-sebut metamorfosis Negara Islam Indonesia (NII) yang telah cukup solid sebagai sebuah organisasi. Organisasinya terstruktur dari tingkat pusat sampai ke daerah. Ini tentu saja fenomena yang patut menjadi perhatian kita semua. Sebab, benih-benih radikalisme ada di sekitar kita", jelas Walikota Cirebon.

Walikota Cirebon Drs, H. Nasrudin Azis, S.H., juga menegaskan, bahwa

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan mitsaqan ghaliza (perjanjian agung) bangsa Indonesia.

Watak dasar radikalisme dengan basis apapun sungguh bertolak belakang dengan Pancasila. Sebagai pondasi dan jiwa yang mendasari bangunan bangsa dan negeri ini, kehadiran Pancasila pertama-tama justru melindungi dan menjamin keberagaman identitas primordial masyarakat bangsa Indonesia", ujarnya.

Dalam arti itu, Pancasila menuntun bangsa ini untuk bersikap inklusif, moderat dalam menampilkan identitas kesukuan dan keagamaan kita, toleran dan gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang takdirnya adalah majemuk.

Oleh Pancasila, keberagaman tidak dibungkam dan disamakan, melainkan dibiarkan hidup berkembang. Hal itu terlihat nyata pada kebijakan negara yang menjamin hak beragama dan beribadah setiap warganya sesuai dengan nilai agama dan kepercayaannya masing-masing.

"Aapun latar belakang primordial warga bangsa ini, setiap orang memiliki kesetaraan di hak dan kewajiban dihadapan hukum negara"

Iya berharap, semua senantiasa berkomitmen menjaga Pancasila, memegang teguh Pancasila, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", tutup Walikota Cirebon.

Editor : BLECK

Pewartar : JIS Agung